

DPRD Mahulu Minta Transparansi dan Sinergi

Penyusunan Anggaran Prioritas 2026

UJOH BILANG, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, Devung Paran, menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan dalam rangkaian pembahasan usulan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah-langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Namun, ia berharap agar proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan melibatkan DPRD secara menyeluruh. “Kita setuju dengan efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kita sangat setuju. Tapi lembaga DPRD harus dilibatkan secara menyeluruh terkait dengan *budgeting* yang harus kita laksanakan di sini, di kabupaten ini,” katanya, Rabu (9/4).

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD telah mengajukan 519 usulan aspirasi masyarakat hasil dari kegiatan reses, yang diharapkan dapat dipertimbangkan secara proporsional dalam penyusunan anggaran. “Kita tidak memaksakan harus terakomodir semua, tapi setidaknya dilihatlah dari 519 ini mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pembahasan anggaran sebaiknya melibatkan seluruh unsur, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD secara bersama-sama. “Harusnya dari lembaga DPRD bersama TAPD, bersama Bupati dan Wakil Bupati, yang membahas ini secara bersama-sama, bersama bangga,” tegasnya.

Menyinggung prinsip transparansi, ia berharap adanya kejelasan atas alasan tidak diakomodasinya sejumlah aspirasi dari DPRD dalam dokumen RKPD.

“Kalau kita bicara konsep transparansi, harusnya aspirasi kami juga kenapa bisa tidak terakomodirkan harus ada penjelasan dari pihak pemerintah ini,” tambahnya.

Ia menutup dengan harapan besar agar sinergitas antara lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mahulu terus diperkuat demi pembangunan daerah yang lebih baik. “Jadi pada intinya begitu, bahwa lembaga DPRD sama Pemerintah Kabupaten Mahulu ini harus bersinergitas untuk membangun Mahulu ini yang lebih baik,” jelasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Mahulu Minta Transparansi dan Sinergi, 10/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Permendagri 12/2024), Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Permendagri 12/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, program, serta penjabaran renstra perangkat daerah.
 - (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
 - (6) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
3. Dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas, serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.